

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa merasa perlu menjaga keamanan internasional. Dalam menjaga keamanan internasionalnya Amerika Serikat mengajak seluruh negara didunia untuk ikut andil dalam hal tersebut. Amerika Serikat banyak melakukan kerjasama dengan negara aliansinya di seluruh kawasan baik itu dalam bidang militer ataupun kerjasama perdagangan. Namun pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama terdapat pergeseran fokus wilayah yang awalnya lebih fokus ke Timur Tengah, namun saat ini Amerika Serikat lebih fokus ke wilayah Asia Pasifik.

Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan baik itu dari segi ekonomi di Asia Pasifik dan juga peningkatan secara kapabilitas militer negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Amerika Serikat sangat menaruh perhatian penuh di wilayah Asia Pasifik dan semakin diperkuat dengan adanya pernyataan sekretaris negara Hillary Clinton pada pidato *East-West Centre* di Hawaii yang menyatakan ¹:

“America’s future is linked to the future of the Asia Pacific region, and the future of this region depends on America”.

Asia Pasifik menjadi perhatian dunia dikarenakan adanya pergeseran politik di Abad ke-21, baik dari segi perkembangan ekonomi maupun militernya. Sehingga kawasan ini mendapat perhatian lebih beberapa tahun belakangan, khususnya dari Amerika Serikat. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi Amerika Serikat terkait kepentingan ekonomi, militer maupun diplomatiknya.

Disisi lain, Amerika Serikat melihat kawasan tersebut sebagai kawasan yang memiliki banyak potensi konflik, dimana dalam hal ini akan mengancam keamanan di wilayah sekitar. Potensi konflik di beberapa wilayah Asia Pasifik

¹ Hillary Clinton, “*America’s Future Linked to Future of Asia Pasific Region*”, diakses pada 23 Februari 2014, pukul 13:42, diakses dari <http://www.eastwestcenter.org/news-center/east-west-wire/clinton-americas-future-linked-to-future-of-asia-pasific-region>

mendorong Amerika Serikat untuk turut andil dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan Presiden Obama pada November 2011 lalu,

*“Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering of human progress.”*²

Pihaknya, sebagai negara adikuasa merasa perlu menjaga keamanan internasional, maka Amerika Serikat memfokuskan kekuatan militernya di wilayah tersebut. Bukan hanya peningkatan ekonomi dan militer yang menjadi faktor pergeseran fokus Amerika Serikat, namun juga dikarenakan adanya potensi konflik di beberapa wilayah Asia Pasifik yang dianggap dapat mengancam keamanan internasional.

Di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat melihat Cina sebagai kekuatan baru yang harus tunduk terhadap *“peaceful development”*. Dalam *“peaceful development”* Amerika Serikat berharap Cina akan menjadi sebuah kekuatan yang damai serta menjaga perkembangannya agar tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara di kawasan.³ Namun di sisi lain, Cina sebagai negara dengan perekonomian yang terus berkembang tentunya memiliki daya tawar yang cukup baik di mata dunia internasional.

Dalam menopang militer negaranya Cina juga membutuhkan perekonomian yang baik. Dalam hal ini Cina banyak melakukan kerjasama perdagangan di wilayah Asia khususnya dengan ASEAN sebagai organisasi regional yang sedang memiliki peningkatan ekonomi yang cukup baik. Kebangkitan ekonomi Cina juga memberikan dampak terhadap penambahan anggaran dalam militer Cina guna memajukan militernya menjadi sebuah kekuatan maritime. Pada masa pemerintahan Hu Jintao, militer Cina lebih difokuskan ke laut. Dalam hal ini, Hu Jintao menganggap pentingnya kekuatan laut dalam menjaga wilayahnya dari

² White House Government, *Remarks By President Obama to the Australian Parliament*. Parliament House, Canberra, Australia diakses pada 13 Juni 2014 pukul 16.30, diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>

³ US Department of Defense, *Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011* page IV.

serangan.⁴ Pada fokus dalam menjadikan negaranya sebagai kekuatan maritime, Cina memilih untuk menekankan penyebaran militernya di Laut Cina Selatan sebagai jangkauan terdekat sebelum merambah ke Asia Pasifik.

Modernisasi militer Cina yang lebih terfokus ke laut juga dipertegas dengan adanya kapabilitas *blue water navy* sebagai bentuk dominasi kekuatan maritime Cina. Peningkatan kekuatan militer Cina memberikan ketakutan tersendiri terhadap dunia internasional khususnya bagi keamanan regional. Beberapa tahun belakangan Cina telah mampu menyempurnakan kapabilitas *green water navy* dan menuju kepada kapabilitas *blue water navy*.

Dalam doktrin *green water navy*, Cina diharapkan mampu melakukan pengembangan kekuatan angkatan laut Cina yang cukup untuk membangun kontrol atas perairan *first chain island*. Dengan kesempurnaan dari kapabilitas *green water navy*, Cina pada saat ini berusaha untuk mengendalikan apa yang disebut sebagai *first island chain* dari Samudra Pasifik. Daerah ini mencakup Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.⁵ Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Laksamana Zhang Xusen, mantan Kepala Staff Komandan Angkatan Laut, konsep *first chain island* meliputi semua territorials Laut Cina Selatan dan pulau-pulau tersebar perairan ini, termasuk Spratly dan Paracel.⁶ Hal ini sejalan dengan konsep bahwa beberapa negara melakukan modernisasi kekuatan militernya dikarenakan adanya beberapa kawasan yang masih menyimpan potensi konflik.⁷

Dalam hal ini, Cina sebagai pihak terkait konflik Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur dalam penguasaan doktrin *first chain island* sebagai bentuk dari kapabilitas *green water navy* dalam menguasai Asia Pasifik, merasa perlu melakukan modernisasi militer yang terfokus ke laut.

Pentingnya keberadaan Laut Cina Selatan sebagai gerbang selatan pertahanan Cina mendorong Cina untuk melakukan penyebaran militer di wilayah tersebut guna mengamankan wilayahnya dari ancaman serangan musuh.

⁴ Asia Times Online, *Greater China*, diakses pada tanggal 26 Juni 2014, pukul 09.00, dari <http://www.atimes.com/atimes/China/IA10Ad01.html>

⁵ Global Security, *People's Liberation Army Navy: Offshore Defense* diakses pada 1 Juli 2014 pukul 04:00, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/plan-doctrine-offshore.htm>

⁶ Huang Caihong, *The PLA Navy's Development Strategy*, *Jianchuan Zhishi*, No. 4, 1989, page 2-4.

⁷ Media Informasi Kementerian Pertahanan, *Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim*, Jakarta International Defence Dialogue, Volume 47 / No. 31 / Maret - April 2014 hal 10.

Namun dalam hal penguasaan Laut Cina Timur terkait konflik Senkaku/Diayou, Cina merasa perlu untuk mengamankan wilayah tersebut dikarenakan kepentingan wilayah Cina yang masih disengketakan. Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur merupakan bagian dari penguasaan *first chain island* oleh Cina. Maka dalam hal ini Cina menganggap perlunya sebuah fokus terhadap sebuah kekuatan maritime untuk melindungi kepentingannya terutama di wilayah Asia Pasifik.

Selain melakukan modernisasi militer angkatan lautnya, Cina juga melakukan pengembangan militer guna unjuk kekuatan di kawasan. Diantaranya pembangunan pangkalan udara di berbagai lokasi yang memiliki nilai strategi ekonomi dan militer guna menopang kekuatan lautnya. Dalam pengembangannya, salah satu tindakan militer Cina yang paling jelas yaitu dengan dibangunnya *Sansha garrison* sebagai sebuah kekuatan militer Cina di wilayah baru Sansha City.⁸ Namun dengan dibentuknya *Sansha garrison*, Cina telah membuktikan peningkatan dari diplomasi koersif yang diarahkan kepada para pihak lain yang terkait sengketa.

Pembangunan militer di Sansha memberikan respon yang kuat dari negara negara di wilayah terkait sikap agresif Cina dalam kegiatan laut terkait sumber daya alam. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengiriman patroli laut dan udara secara intensif oleh Cina ke area yang sudah diduduki oleh negara lain dengan mengirimkan kapal laut untuk mengawal kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut.⁹ *Sansha Garrison* dibangun Cina dengan tujuan memberikan efek pemaksaan serta penangkalan yang mana ditujukan sebagai *power projection* yaitu unjuk kekuatan. Pembangunan Sansha Garrison juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Cina karena mampu melakukan *surveillance* dan menempatkan instrumen militernya di wilayah administrasi barunya tersebut.¹⁰ Namun disisi lain, terlihatnya sikap agresif Angkatan Laut Cina menimbulkan sikap provokatif dan dianggap mengganggu stabilitas keamanan negara negara di sekitar kawasan.

⁸ Oriana Skylar Mastro, "The Sansha Garrison: China's Deliberate Escalation in the South China Sea", East and South China Sea Bulletin 5, CNAS.org, September 2012, page 3.

⁹ Carlyle A. Thayer. "The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea", *Security Challenges*, Vol. 6, No. 2 (Winter 2010), page 76.

¹⁰ Yudha Kurniawan, "Quo Vadis Konflik Laut Cina Selatan", UPN "Veteran" Jakarta, Oktober 2009, page 15.

Dalam usahanya menjadi sebuah kekuatan maritime dengan kapabilitas *green water navy*, Cina juga terindikasi melakukan *Anti Access/Area Denial* dengan kepemilikan Cina atas pengembangan *Armed Anti-Ship Ballistic Missiles* atau apa yang disebut dengan SSBN yaitu kemampuan kapal berbasis nuklir.¹¹ *Anti Access/ Area Denial* (A2/AD) sendiri merupakan sebuah penutupan akses atau blokade bagi negara lain yang dapat terbentuk melalui kemampuan senjata militer misil balistik dengan jangkauan jarak luas.¹² Daya jangkau misil balistik yang dimiliki Cina tersebut memungkinkan Cina untuk melakukan blokade akses bagi negara lain, khususnya di perairan Laut Cina Selatan.

Dalam hal ini, dunia internasional menganggap sikap Cina dalam mendominasi Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur sebagai sebuah ancaman baik dalam hal stabilitas keamanan maupun stabilitas jalur pelayaran yang terletak di perairan Pasifik. Sedangkan bagi Cina sendiri, hal tersebut merupakan sikap tegasnya dalam upaya memperjuangkan klaimnya terkait konflik di wilayah serta pengembangan *blue water navy* menuju 2020 dimana Cina berambisi menjadi sebuah kekuatan maritime global.

Menanggapi hal ini, Amerika Serikat melihat bahwa sikap Cina dapat mengancam stabilitas keamanan maupun stabilitas SLOCs (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur pelayaran internasional yang membentang di Asia Pasifik dan menjadi bagian di perairan Laut Cina Selatan. Pengembangan militer Cina yang bersifat ekspansif di wilayah telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan *rebalancing strategy* di wilayah tersebut. Penyebaran militer Amerika Serikat merupakan bentuk dari kebijakan *rebalancing* yang dilakukan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Cina sehingga Cina dapat bersikap lebih lunak terhadap dominasi nya di Asia Pasifik. Hal tersebut terlihat dengan bertambahnya penempatan serta kapabilitas militer

¹¹ US Department of Defense, *Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011* page IV.

¹² *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2013*, A Report to Congress Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000, page 6.

serta kerjasama militer Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Pasifik pada tahun 2013.¹³

Di wilayah Asia Pasifik, *rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat didasari oleh suatu masalah yang dianggap mengancam keamanan internasional di wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan karena dominasi Cina yang semakin terlihat di wilayah Asia Pasifik. Dalam melakukan *rebalancing* di wilayah tersebut, Amerika Serikat mengajak negara-negara aliansi maupun non-aliansi di kawasan untuk melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan. Masuknya Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik didasari oleh keinginannya untuk melakukan penguatan aliansi serta pembentukan kerjasama keamanan dengan negara-negara di Asia Pasifik. Hal ini terlihat pada kerjasama pertahanan maupun aktivitas militer beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2010, Amerika Serikat mengajak Vietnam untuk melakukan kerjasama pertahanan yang diawali dengan diumumkannya bagian komersial dari *Cam Ranh Bay* yang akan dibuka untuk kunjungan oleh semua angkatan laut satu kali pertahun.¹⁴ Hal ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam menjalin kerjasama pertahanan Amerika Serikat dengan Vietnam. Keterlibatan USS John McCain dalam latihan angkatan laut bersama Amerika Serikat dan Vietnam bertujuan untuk membuka pintu kerjasama pertahanan keduanya. Meski begitu, pada pengaturan kerja sama pertahanan dan akses yang dilakukan Amerika Serikat dengan Vietnam akan dilakukan dengan sangat berhati-hati agar tidak memprovokasi China. Amerika Serikat juga memantapkan kerjasama pertahanannya dengan Vietnam melalui kesepakatan *Memorandum of Understanding on Defence Cooperation and Initiation of Low-Level Naval Exchange Activities*, yang menyepakati penempatan kapal induk Amerika di Laut Cina Selatan.¹⁵

¹³ Robert G. Sutter, Michael E. Brown, and Timothy J. A. Adamson, with Mike M. Mochizuki and Deepa Ollapally, *Balancing Acts : The U.S Rebalance and Asia Pacific Stability*, International Affairs, The George Washington University, August 2013, page 11.

¹⁴ Bangkok Post October 2010, "*Vietnam to reopen Cam Ranh Bay to foreign fleets: PM*", diakses pada 2 Juli 2014 pukul 17:15, diakses dari <http://www.bangkokpost.com/news/asia/204055/vietnam-to-reopen-cam-ranh-bay-to-foreign-fleets-pm>

¹⁵ Carlyle A. Thayer, *China's Naval Modernization and US Rebalancing: Implications for Stability in South China Sea*, 4th International Workshop on the South China Sea by Diplomatic Academy of Vietnam and the Vietnam Lawyer's Association, November 2012, page 18.

Amerika Serikat juga berhasil mengajak Filipina untuk ikut andil dalam kerjasama pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Pada dialog Menteri Amerika Serikat dan Filipina yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2012, kedua negara mendiskusikan tentang kerja sama keamanan untuk memasukkan kesadaran maritim, dan cyberspace¹⁶. Upaya Amerika Serikat dalam melakukan pertimbangan juga terindikasi dengan peningkatan hubungan melalui penjualan perlengkapan militer ke Filipina guna membantu Filipina mencapai postur pertahanan minimum yang kredibel terhadap ancaman eksternal. Hal ini dibuktikan pada 3 Mei 2012, dimana Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan pembiayaan militer asing dari \$11.900.000 menjadi \$30 juta per tahun.¹⁷

Dalam menyikapi kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat menggunakan *rebalancing strategy* dalam kehadirannya di kawasan. Perlunya kontrol keamanan di wilayah mendorong Amerika Serikat untuk ikut andil dalam meredam potensi konflik yang ada di kawasan. Hal ini terindikasi oleh sikap agresif Cina di kawasan terkait dengan modernisasi militer Cina yang terfokus ke laut serta kapabilitas Cina dalam melakukan *Anti-Access/Area-Denial* pada beberapa tahun belakangan.

Penelitian ini akan mengambil rentang waktu yang dimulai pada tahun 2010, dimana terlihat banyak indikasi pergerakan militer angkatan laut Cina di Laut Cina Selatan yang mana pergerakan militer Cina tersebut memberikan ancaman terhadap keamanan di kawasan. Penelitian ini akan berhenti pada tahun 2013 dimana pada tahun tersebut telah terdapat banyaknya militer Amerika Serikat di Asia Pasifik yang digunakan sebagai kebijakan dalam merespon modernisasi militer angkatan laut yang dilakukan Cina di kawasan.

I.2. Rumusan Masalah

Asia Pasifik merupakan wilayah yang menjadi perhatian dunia baik dari segi perkembangan ekonomi maupun militernya pada Abad ke-21. Kawasan ini

¹⁶ CSIS, "Implications and Results: United States-Philippines Ministerial Dialogue" diakses pada 18 Juni 2014 pukul 15:00, diakses dari <http://csis.org/publication/implications-and-results-united-states-philippines-ministerialdialogue>

¹⁷ *Ibid.*

mendapat perhatian lebih beberapa tahun belakangan oleh kekuatan dari eksternal, khususnya Amerika Serikat. Selain memiliki kepentingan ekonomi, militer dan diplomatik, kehadiran Amerika Serikat di kawasan juga ditujukan dalam mengurangi potensi konflik di masa depan. Potensi konflik yang ada di Asia Pasifik salah satunya dipicu oleh ambisi Cina dalam modernisasi militernya yang terfokus ke laut.

Dalam hal ini, Cina melakukan modernisasi militer yang terindikasi melakukan *Anti-Access/Area-Denial* dengan adanya penyebaran kekuatan militer di wilayah perairan Asia Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan. Hal ini memberikan dampak kekhawatiran bagi negara-negara di sekitar kawasan. Menanggapi hal ini, Amerika Serikat melakukan *rebalancing strategy* di wilayah Asia Pasifik. *Rebalancing strategy* Amerika Serikat akan dilihat mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan secara spesifik penelitian ini akan mencoba mengangkat hal penting untuk diteliti yaitu :

Bagaimana implementasi *rebalancing strategy* Amerika Serikat dalam merespon modernisasi militer Cina di Asia Pasifik periode 2010-2013?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana modernisasi militer Cina yang terfokus ke laut dianggap dapat memberikan ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
- b. Untuk menggambarkan bagaimana implementasi dari *rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat dalam merespon sikap Cina terkait modernisasi militer yang dilakukan oleh Cina di wilayah Asia Pasifik periode 2010-2013.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional dalam memperkaya wawasan mengenai *rebalancing strategy* yang dapat dipergunakan sebagai salah

satu referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam melengkapi karya tulisnya.

- b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai perkembangan militer Cina di Asia Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan dengan adanya modernisasi militer yang terfokus kepada kekuatan angkatan laut Cina. Serta mengetahui implementasi dari *rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat di Asia Pasifik dalam merespon kekuatan Angkatan Laut Cina di kawasan.
- c. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi para pembaca, dan tentunya memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan teman-teman yang membacanya.

I.5. Tinjauan Pustaka

Amerika Serikat sebagai negara yang menaruh perhatian penuh di Asia Pasifik melihat adanya potensi konflik di wilayah tersebut. Ambisi Cina dalam mencapai kapabilitas *blue water navy* telah membawa Cina sebagai negara yang dinilai akan mendominasi perairan Asia Pasifik. Meski saat ini Cina baru terindikasi melakukan penguasaan terhadap Laut Cina Selatan sebagai bentuk kesempurnaan dari kapabilitas *green water navy* yang dimilikinya. Hal ini membawa kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dikarenakan ambisi yang dimiliki Angkatan Laut Cina dalam mencapai kapabilitas *blue water navy*. Dengan kapabilitas ini, Cina dapat menguasai seluruh perairan Pasifik dengan tujuan akhir sebagai sebuah kekuatan maritime global. Amerika Serikat melihat hal ini sebagai sebuah potensi konflik yang akan memberikan ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan. Amerika Serikat kemudian merespon hal ini dengan melakukan strategi *rebalancing* di kawasan Asia Pasifik guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur baik itu referensi buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan interaksi konflik antara Cina dan Amerika Serikat. Berikut merupakan beberapa referensi buku dan jurnal yang digunakan.

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Modernisasi militer Cina terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik*"¹⁸, yang ditulis oleh Aldrin Erwinsyah mengutarakan bahwa keunggulan Cina dalam aspek ekonomi maupun militer pada saat ini telah membawa Cina pada posisi diplomatik yang semakin kuat. Melalui modernisasi militer yang dilakukannya, Cina memiliki potensi yang semakin besar dalam memberikan pengaruhnya yang akan melahirkan sebuah pergeseran kekuatan. Sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan pertahanan nasionalnya, sasaran utama modernisasi militer Cina dilakukan untuk menyiapkan kekuatan yang cukup dalam menghadapi musuh di kawasan, mempertahankan kredibilitas militernya guna menopang klaim teritorial, melindungi kepentingan nasionalnya, menjaga keamanan dalam negeri serta menangkal setiap tindakan agresi.

Pengembangan kekuatan militer dan modernisasi persenjataan Cina yang terus berkembang dirasakan perlu untuk diantisipasi mengingat potensi konflik yang masih terjadi antara Cina dan para negara tetangganya di wilayah Asia Timur. Modernisasi Cina yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan militernya membawa negara-negara di kawasan Asia Timur untuk merasakan keberadaan '*power*' dalam hubungan politik keamanan di wilayah tersebut. Melihat hal ini, Amerika Serikat sebagai dominasi di kawasan beranggapan bahwa tindakan modernisasi Cina merupakan ancaman pada kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengimbangi militer Cina adalah dengan menghadirkan pasukan militer Amerika Serikat di wilayah Asia Timur dengan dukungan dari beberapa negara di wilayah tersebut.

Amerika Serikat menggunakan strategi enlargement dengan memanfaatkan Jepang dalam menghadapi Cina di kawasan Asia Timur. Meski Cina berulang kali mengingatkan sikap Amerika Serikat yang intervensif, namun dalam sikap intervensifnya Amerika Serikat sangat berhati-hati guna menjaga kestabilan keamanan di kawasan tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak menginginkan perpecahan di Cina daratan yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap negara-negara di kawasan serta

¹⁸ Aldrin Erwinsyah, *Pengaruh Modernisasi militer Cina terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik*, Universitas Indonesia, 2011.

dapat merugikan Amerika Serikat. Meski perebutan kekuasaan antara dua kekuatan tersebut semakin memanas terutama pada bidang militer, namun kedua negara tetap melakukan kerjasama pada bidang perdagangan.

Dalam tulisan yang berjudul "*China Factor in U.S.-Vietnam Relations*"¹⁹, yang ditulis oleh James Bellacqua, penulis menjabarkan tentang peran China dalam hubungan Amerika Serikat dan Vietnam. Peningkatan hubungan kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat pada kerjasama keamanan, khususnya dalam tenaga nuklir, penerbangan sipil, militer serta dalam memerangi kejahatan transnasional. Kemajuan hubungan Amerika Serikat - Vietnam ditunjukkan dengan peningkatan hubungan militer - militer dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2010 USS George Washington menjadi kapal induk Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Vietnam. Kedua Negara juga melakukan latihan angkatan laut bersama pertama mereka pada tahun 2010, serta melakukan penandatanganan perjanjian baru untuk personil militer Vietnam dalam bidang pendidikan militer profesional pada perguruan tinggi Amerika Serikat. Vietnam disisi lain memiliki beberapa motivasi dalam meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Motivasi Vietnam didasarkan pada kepentingan sektor ekonomi dan keamanan.

Pada permasalahan ekonomi, Vietnam berorientasi pada ekspor, dimana Amerika Serikat berperan sebagai sumber investasi FDI (*foreign direct investment*). Pada kebijakan luar negeri dan masalah keamanan, Vietnam berusaha meningkatkan hubungan kemandirian dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya untuk memperluas hubungan luar negeri dengan menjalin hubungan bilateral dengan kekuatan eksternal.

Tulisan ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan Vietnam memiliki sejumlah alasan untuk menginginkan hubungan yang lebih erat, namun dibalik itu Cina merupakan faktor yang paling penting membentuk hubungan bilateral mereka. Tindakan yang diambil oleh Cina akan terus mempengaruhi kecepatan dan ruang lingkup kerja sama lebih lanjut antara Vietnam dan Amerika Serikat, terutama pada masalah keamanan.

¹⁹ James Bellaqua, *China Factor in U.S.-Vietnam Relations*, CNA China Studies.

Selain itu, sikap penolakan Cina untuk membahas Laut Cina Selatan dengan masing-masing pengklaim lainnya dalam pengaturan multilateral akan memperkuat tekad Vietnam untuk melibatkan Amerika Serikat sebagai kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan bersama di Asia Tenggara. Mengingat sejarah bergolak antara Cina dan Vietnam, retorika agresif dan mengancam perilaku dari Cina kemungkinan akan mengintensifkan ketidakamanan Vietnam dan menyebabkan Vietnam untuk menggunakan Amerika Serikat sebagai payung keamanan.

Dalam jurnal yang berjudul "*The Reassertion of the United States in the Asia-Pacific Region*"²⁰, yang ditulis oleh Tanguy Struye de Swilande menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mempertahankan posisinya sebagai kekuatan Pasifik ditengah perkembangan situasi politik keamanan di Laut Cina Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang lebih dinamis. Menurut penulis, munculnya kekuasaan yang baru membuat Amerika Serikat harus berfikir kembali dalam pola hubungan dengan negara negara sekitar.

Penulis berpendapat bahwa kemunculan kekuasaan baru menyebabkan Amerika Serikat bukan hanya memiliki keharusan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri di Asia Pasifik, namun juga mendorong negara negara lain dalam perjanjian regional, bilateral, dan multilateral guna bekerja sama dalam mempertahankan bukan hanya kepentingan Amerika Serikat namun juga kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara negara di wilayah konflik.

Langkah Amerika Serikat dalam memperdalam hubungannya dengan sekutu sekutunya di wilayah tersebut merupakan bentuk dari tindakan Amerika Serikat dalam mencari simpati negara negara sekitar wilayah konflik. Berbagai deklarasi resmi telah dilakukan, namun fokus Amerika Serikat di wilayah tersebut akan tetap tertuju kepada perimbangan terhadap peningkatan kekuatan politik, militer, maupun ekonomi Cina. Selain itu, Amerika Serikat juga akan memantau SLOC melalui penyebaran Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan. Namun dalam perjalanannya, Amerika Serikat bukan hanya memperdalam kerjasama dalam bidang keamanan, tetapi Amerika Serikat juga mengajak negara negara tersebut untuk memimpin sejumlah isu keamanan di wilayah konflik. Upaya tersebut

²⁰ Tanguy Struye de Swilande, *The Reassertion of the United States in the Asia-Pacific Region*, Spring 2012.

dilakukan Amerika Serikat guna mencairkan konflik di Laut Cina Selatan sebagai jalan dalam menguasai Asia Pasifik dan melakukan control keamanan di wilayah.

Dalam buku yang berjudul "*Balancing Acts : The US Rebalance and Asia Pacific Stability*"²¹, penulis menjelaskan mengenai strategi Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama dalam melakukan *rebalance* serta dampaknya terhadap fokus kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat memiliki kaitan yang erat dengan negara negara di Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan peran Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan kawasan sejak awal perang dunia ke II. Peningkatan baik dari segi ekonomi maupun militer yang dialami Cina mendorong Amerika Serikat untuk masuk ke wilayah Asia Pasifik.

Hal ini dianggap Amerika cukup mengancam keberadaan Amerika Serikat yang selama ini menjadi kekuatan di wilayah tersebut. Menanggapi peningkatan yang dialami Cina, Obama menjelaskan bahwa Amerika Serikat tentunya juga mendapat keuntungan dengan kesuksesan Cina di kawasan. Maka pihaknya mendukung penuh kesuksesan Negara tersebut. Namun di sisi lain, Obama juga menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan membiarkan Cina berkembang dengan 'peaceful development' yang mana berarti Cina berkembang tanpa merugikan pihak lain. Namun hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Cina.

Permasalahan sengketa dengan negara negara tetangga seperti konflik Laut Cina Selatan dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik membawa Amerika Serikat untuk melakukan *rebalancing* terhadap kawasan tersebut. Meningkatnya kapabilitas militer Cina mengancam kemandirian negara negara aliansi Amerika Serikat seperti Filipina dan Jepang. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama militer dengan negara negara tersebut seperti adanya latihan militer bersama di Filipina.

Selain itu Amerika Serikat juga memulai beberapa kerjasama dengan negara negara lain di kawasan baik pada bidang militer, ekonomi, maupun politiknya. Menanggapi hal ini, Cina merasa Amerika Serikat telah memprovokasi konflik yang ada di wilayah. Melalui kehadirannya di Asia Pasifik, Cina menganggap Amerika Serikat justru mendorong eskalasi konflik dengan memberikan bantuan

²¹ Robert G. Sutter, Michael E. Brown, and Timothy J. A. Adamson, with Mike M. Mochizuki and Deepa Ollapally, "*Balancing Acts : The U.S Rebalance and Asia Pacific Stability*", International Affairs, The George Washington University, August 2013.

baik dalam segi militer maupun ekonomi kepada negara-negara terkait konflik teritorial di wilayah tersebut.

Dari beberapa literatur penelitian di atas terlihat bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti buat. Penelitian ini akan membahas mengenai strategi *rebalancing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi Cina di Asia Pasifik. Hal tersebut dilakukan karena Amerika melihat bahwa tindakan militer Cina terkait modernisasi militer yang dilakukan akan menimbulkan potensi konflik dan mengancam stabilitas keamanan di kawasan. Kekhawatiran negara-negara di kawasan juga mendorong Amerika Serikat untuk melakukan strategi *rebalancing* di wilayah tersebut guna mengurangi potensi konflik di kawasan yang dipicu oleh Modernisasi militer Angkatan Laut Cina.

I.6. Kerangka Pemikiran

I.6.1. Konsep *Rebalancing Strategy*

Istilah *rebalancing strategy* dinilai lebih cocok dan menekankan elemen kontinuitas dalam strategi pemerintahan saat ini dengan para pendahulunya.²² Strategi ini adalah soal penekanan prioritas suatu negara yang berusaha mengelaborasi hubungan negara yang sudah ada sebelumnya. Menurut Robert G. Sutter, Michael E. Brown, and Timothy J.A Adamson, with Mike Mochizuki and Deepa Ollapally, menjelaskan bahwa *rebalance strategy* memiliki tiga bidang, diantaranya keamanan, ekonomi dan diplomasi²³.

Konsep *rebalancing strategy* dalam bidang pertahanan merupakan sebuah kebijakan dalam mempertegas kehadiran suatu negara baik itu militer, ekonomi dan diplomasi di suatu kawasan melalui penguatan aliansi maupun perluasan kerjasama keamanan melalui negara-negara di kawasan tersebut. Terdapat dua indikator dalam *rebalancing strategy* pada bidang militer, yaitu adanya penempatan militer baru dan adanya perluasan kerjasama keamanan untuk meraih integrasi militer yang lebih baik²⁴.

²² Richard Weitz, 2012, *Pivot Out, Rebalance In*, diakses dari <http://thediplomat.com/2012/05/pivot-out-rebalance-in/> pada tanggal 27 Juni 2014 pukul 14:00

²³ Robert G. Sutter, Michael E. Brown, and Timothy J.A Adamson, with Mike Mochizuki and Deepa Ollapally, *Balancing Acts: The U.S Rebalance and Asia-Pacific Stability*, August 2013, The George Washington University,

²⁴ *Ibid.*

Rebalancing strategy ke Asia-Pasifik ini merupakan strategi politik luar negeri yang diusung oleh pemerintahan Obama. Frase *rebalance to Asia* ini dimaksudkan untuk menekankan meningkatnya prioritas dari kawasan ini dalam kebijakan global AS. Strategi ini merupakan pendalaman dari upaya pemerintahan Obama, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meningkatkan visibilitas diplomatik AS dan kehadiran di Asia-Pasifik. Mungkin yang paling menonjol, sejak 2009, Administrasi Obama secara konsisten memberikan waktu dan penekanan ke Asia Tenggara dan lembaga-lembaga multilateral regional.²⁵

Strategi ini pada awalnya lebih dikenal dengan nama Asian Pivot. Namun istilah ini seolah-olah menggambarkan Amerika Serikat melepaskan Asia dan berusaha terlibat kembali di kawasan tersebut. Pada kenyataannya Amerika Serikat tidak pernah meninggalkan Asia-Pasifik. Istilah *pivot* lalu ditinggalkan dan diganti dengan istilah *rebalancing strategy*.

I.6.2. Modernisasi Militer

Dalam teori modernisasi militer yang di tulis oleh Melvin R. Lard and Lawrence J. Korb menjelaskan bahwa:

*Modernisasi militer merupakan upaya kesiapan militer yang difokuskan pada kemampuan negara dalam mengganti setiap persenjataan yang sudah tidak layak pakai atau melakukan peningkatan jumlah persenjataan serta upaya untuk pergantian senjata yang lebih modern dan canggih.*²⁶

Dengan kata lain, modernisasi persenjataan militer tidak hanya menekankan pada kuantitas tetapi juga kualitas persenjataan yang siap dalam penggelaran operasi militer di medan tempur dan sesuai dengan karakter yang ada. Modernisasi militer merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan keamanan negara serta mencapai suatu kepentingan nasional negara.

Modernisasi militer secara besar-besaran juga mampu membuat suatu persoalan dalam keamanan internasional. Hal ini akan menciptakan suatu spiral

²⁵ Congressional Research Service, *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*, Maret 2012.

²⁶ Melvin R. Lard and Lawrence J. Korb, *The Problem of Military Readiness*, page 4 dalam "Military Readiness" by Major M.R.Voith. page 42

aksi reaksi dalam pembangunan persenjataan antar negara (security dilemma)²⁷. Militer dan persenjataan memiliki fungsi penting pada suatu negara, seperti deterrence, defense, dan compellence, ketiganya menjelaskan tentang konsep mengapa banyak negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya.²⁸

- a. Deterrence adalah memperlihatkan kekuatan militer dari suatu negara sehingga dapat mencegah negara lain (dalam hal ini pihak yang dianggap mengancam) untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian juga dapat disebut sebagai ancaman balasan sebagai hukuman agar pihak lawan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman hukuman tersebut ditujukan pada populasi atau infrastruktur industri sang lawan.²⁹
- b. Defense adalah usaha untuk mengurangi kemampuan pihak lawan untuk menghancurkan atau menguasai sesuatu dari pihak defender. Konsep defense dengan menggunakan kekuatan militer dilakukan untuk mencapai dua tujuan; berjaga jaga untuk mengantisipasi serangan dari pihak lawan dan meminimalisi kerugian jika diserang. Untuk tujuan bertahan, negara dapat menempatkan pasukan militer tersebut ketika terjadi sebuah serangan, atau melakukan first strike ketika pihak lawan dipercaya akan melakukan serangan.³⁰
- c. Compellence merupakan konsep yang berada pada dua level antara deterrence dan defense. Compellence dengan menggunakan kekuatan militer bertujuan untuk bisa menghentikan pihak musuh ketika telah atau belum melakukan suatu tindakan yang merugikan. Compellence dapat digunakan untuk memaksa fisik atau damai.³¹

I.6.3. Kepentingan Nasional

Dalam teori kepentingan nasional menjelaskan bahwa kelangsungan hidup suatu negara adalah dimana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan negaranya

²⁷ Robert Jervis, *The security dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics*, (New York: Palgrave) page 45.

²⁸ Robert J. Art and Robert Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*, page 142.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

dengan kata lain negara tersebut telah mencapai kepentingannya. Negara akan berjalan dengan stabil dan baik jika kepentingan nasionalnya sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain jika suatu negara telah memenuhi kepentingan nasionalnya maka negara tersebut akan bisa *survive*. Kepentingan nasional merupakan tujuan dasar dan faktor yang menentukan dalam memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Menurut Daniel. S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, ideologi, kekuatan militer dan keamanan nasional, moralitas dan legalitas.³² Dalam penelitian ini akan dibahas kepentingan nasional yang berdasarkan pada aspek pertahanan dan keamanan nasional. Menurut paradigma realis, negara perlu membangun power untuk mencapai keamanan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Sistem internasional yang anarki mendorong negara untuk terus mencapai kekuatan. Untuk mendapatkan sebuah keamanan negara perlu membangun kekuatan militer baik pembangunan kekuatan militer yang bersandar pada kekuatan nasional maupun aliansi sebagai bentuk dari maksimalisasi atau implementasi strategi militer kolektif untuk mencapai keamanan.³³ Suatu negara jika ingin mempertahankan intergitas negaranya perlu mencapai kepentingan nasional negara tersebut, terutama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negaranya.

I.6.4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.³⁴ Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun

³² Daniel S. Papp, *“Contemporary International Relation”: A Framework For Understanding, Second Editions*, (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), page 29.

³³ Afrimadona dan Yugolastarob Komeini, *Bab 2 Perspektif – Perspektif Utama Dalam Kajian Strategis*, (Jakarta: FISIP UPNVJ 2010) page 18-19 dalam buku Memahami Kajian Strategis.

³⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal 5.

kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.³⁵

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.³⁶ Kebijakan Luar Negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.³⁷ Menurut, Apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal termasuk di dalamnya aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.³⁸

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
- b. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
- c. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
- d. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
- f. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.³⁹

³⁵ Keohane, Robert O. Dan Joseph S.Ny. 1997. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown Company, hal. 24-25.

³⁶ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27.

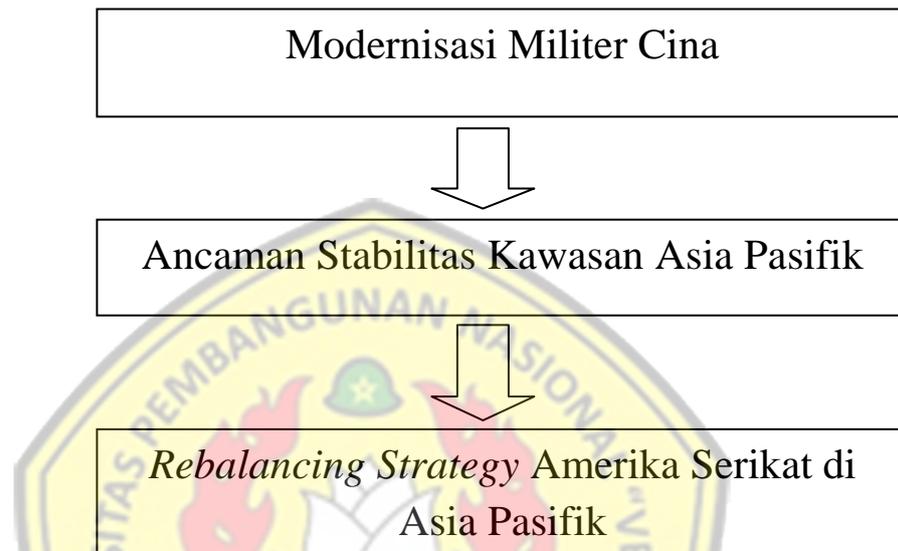
³⁷ *Ibid* hal. 32.

³⁸ *Ibid* hal. 35.

³⁹ Jack C. Piano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 6.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.⁴⁰

I.7. Alur Pemikiran



I.8. Asumsi

Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan modernisasi militer Cina merupakan upaya dalam memperlihatkan kapabilitas militer dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Asia Pasifik.
- b. *Rebalancing strategy* yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan upaya untuk mengurangi dominasi perluasan kapabilitas militer Cina di Asia Pasifik.
- c. *Rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat dilakukan dengan adanya penyebaran militer dan kerjasama aliansi di Asia Pasifik.

I.9. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini melihat bagaimana implementasi dari *rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat di Asia Pasifik guna menahan perluasan

⁴⁰ K.J Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 21.

kapabilitas militer Cina kawasan. Periode penelitian ini akan dimulai pada tahun 2010 dan akan berakhir pada tahun 2013. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan dalam melakukan studi dan penelitian. Hal itu diperlukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

Pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial memiliki masalah sulit dan khusus dimana ilmu pengetahuan sosial dapat berupa bagian dari obyek studi ilmu lain dan memiliki nilai-nilai dan kecenderungan pribadi yang dapat berpengaruh dalam proses penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian dapat dilakukan dengan benar metodologi penelitian diperlukan dalam mendeksripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena hubungan internasional. Selain itu, metodologi diperlukan agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih kompeten dan lebih analitis dalam mereview bahan-bahan literatur yang terkait.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu adalah suatu proses penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia⁴¹. Selain itu, pendekatan kualitatif lazimnya mengikuti pola induktif dimana penelitian diawali dengan pengamatan terhadap sebuah fenomena atau fakta empiris yang spesifik dan unik yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah generalisasi empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah teori baru mengenai fenomena atau fakta yang diteliti. Maka metode penulisan penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bersifat mendeskripsikan kenyataan atau fakta sesuai data yang diperoleh dan memberikan makna pada permasalahan tersebut

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber dari data primer dapat berupa pernyataan resmi, *press release* dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sementara sumber dari jenis data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal ilmiah, laporan tertulis, media massa, artikel serta situs internet resmi pemerintahan. Setelah

⁴¹ Nana Syaodih, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 60

data-data sudah terkumpul melalui seleksi dan pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan dapat diartikan secara jelas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II MODERNISASI MILITER CINA

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan modernisasi militer yang dilakukan oleh Cina. Dalam melakukan modernisasi militernya Cina juga didukung dengan peningkatan ekonomi yang cukup baik, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan anggaran militer negaranya. Menjelaskan mengenai tujuan yang ingin di capai terkait kepentingan nasionalnya melalui adanya modernisasi militer. Menjabarkan apa saja yang dilakukan Cina dalam melakukan modernisasi militer Cina serta hal hal yang dinilai Amerika Serikat dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

BAB III IMPLEMENTASI *REBALANCING STRATEGY* AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK

Bab ini akan membahas mengenai implementasi dari *rebalancing strategy* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Bagaimana implementasi dari adanya *rebalancing strategy* yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan dengan adanya penguatan aliansi, penempatan militer maupun kerjasama pertahanan yang dilakukan Amerika Serikat dengan negara negara di kawasan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

